



Optimalisasi Manajerial Pengelolaan Dana Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid 19 Didesa Sumberejo Mranggen Kabupaten Demak

Nanang Yusroni^{1*}, Ricza Irhamni², Purnomo Purnomo³

^{1,2,3}Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wahid Hasyim, Semarang

Jl. Nakula I No. 5-11 Semarang, Indonesia

Korespondensi penulis: nanangyusroni@unwahas.ac.id

Diterima: Maret 2024; Direvisi: April 2024; Dipublikasikan: Mei 2024

ABSTRACT

The Sumberejo Village Office is tasked with carrying out government, development and community affairs, as well as carrying out public services in the field of Population Administration based on Demak Regency Regional Regulation Number 10 of 2014, one of which is serving community administration. During the PPKM period there were various obstacles in determining the target strategy for targeting poor people who would be given social assistance, so far the process of collecting data on poor families is currently carried out by each RT manually on writing paper, to then be given to Village staff, there are obstacles in processes related to the length of time each RT provides data information and preparing data recapitulation reports. Apart from that, there are other obstacles related to the process of determining the provision of poor funds because there is no simulation of the calculation method. By supporting decisions to provide funds for underprivileged communities using the Analytical Hierarchy Process (AHP) method which can later support determining assistance for the community. The criteria used in providing PKH funds are education, employment, income, status, age, residence, health and number of children.

Keywords: PPKM, poor, Analytical Hierarchy Process (AHP) Assistance

ABSTRAK

Kantor Desa Sumberejo bertugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, serta melaksanakan pelayanan publik di bidang Administrasi Kependudukan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 10 Tahun 2014 salah satunya dalam melayani administrasi masyarakat. Selama masa PPKM mengalami berbagai hambatan dalam menentukan strategi tujuan sasaran masyarakat miskin yang akan di berikan bantuan sosial, selama ini proses pendataan keluarga miskin saat ini dilakukan oleh masing-masing RT secara manual pada kertas tulis, untuk selanjutnya diberikan kepada staff Desa, terdapat kendala dalam proses terkait lamanya penginformasian data masing-masing RT dan pembuatan laporan perekapan data. Selain itu, terdapat kendala lain terkait proses penentuan pemberian dana miskin karena tidak adanya simulasi metode perhitungan. Dengan pendukung keputusan untuk pemberian dana bagi masyarakat kurang mampu menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP) yang nantinya dapat mendukung dalam penentuan bantuan untuk masyarakat. Kriteria yang digunakan dalam pemberian dana PKH yaitu pendidikan, pekerjaan, penghasilan, status, umur, tempat tinggal, kesehatan, dan jumlah anak.

Kata Kunci: PPKM, miskin, Bantuan Analytical Hierarchy Process (AHP)

PENDAHULUAN

Kasus pemotongan dana bantuan sosial bagi masyarakat terdampak PPKM kembali mengemuka di masyarakat. Di Kelurahan Sumberejo, Mranggen, sejumlah warga RW 05 melaporkan Bantuan Sosial Tunai (BST) yang diterima telah dipotong Rp50.000 (media

indonesia. com, 29 Juli 2021). Demikian juga di Kelurahan Sumberejo, Mranggen, warga melaporkan dugaan pemotongan BST mencapai ratusan ribu rupiah yang dilakukan pengurus lingkungan (liputan6.com, 5 Agustus 2021).

BST merupakan bagian dari jaring pengaman sosial untuk mengurangi beban masyarakat akibat pandemi COVID-19. Melonjaknya kasus terkonfirmasi COVID-19 mendorong pemerintah menerapkan PPKM yang diperpanjang hingga 16 Agustus 2021. Secara sosial ekonomi, pembatasan mobilitas dan aktivitas sosial ekonomi masyarakat semakin menekan perekonomian masyarakat. Banyak masyarakat kelompok rentan miskin berubah menjadi kelompok miskin baru. Badan Pusat Statistik mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2021 sebesar 10,14 persen atau 27,54 juta orang (bps.go.id, 15 Juli 2021). Jumlah ini diperkirakan meningkat seiring dengan penerapan PPKM dan perpanjangannya.

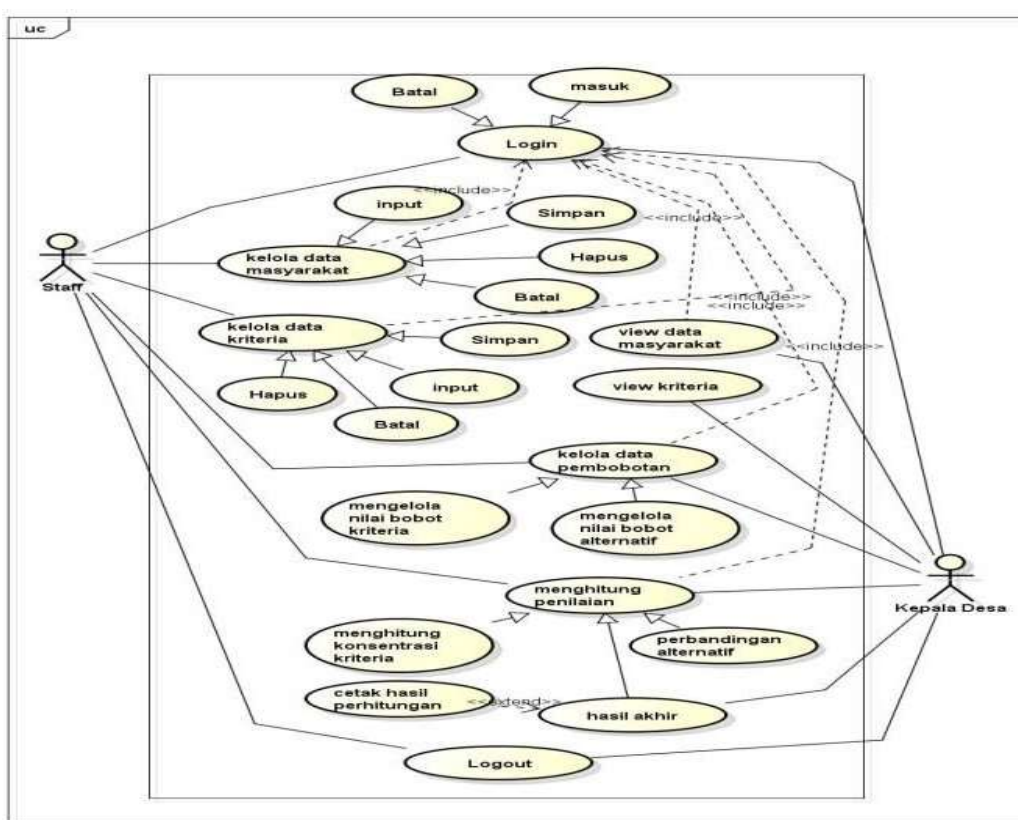
Kebijakan bantuan sosial diharapkan dapat membantu masyarakat yang terdampak PPKM. Selain bantuan sosial yang telah berjalan sebelumnya, pemerintah juga memberikan bantuan sosial ekstra bagi masyarakat terdampak PPKM seperti BST dan Bantuan Beras. Kebutuhan akan perbaikan sistem penyaluran bantuan sosial yang selama ini masih menghadapi permasalahan muncul seiring dengan penerapan PPKM. Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini mengkaji permasalahan penyaluran bantuan sosial dalam masa PPKM dan solusi perbaikannya (Mada et al., 2017).

Berdasarkan Peraturan Menteri Sosial RI No. 20 Tahun 2019 bantuan sosial dapat diberikan dalam bentuk bantuan sosial pangan (sembako) kepada keluarga penerima manfaat dari kelompok masyarakat berpenghasilan rendah/keluarga miskin dan rentan yang terkena dampak Covid-19. Bantuan sosial pangan bertujuan untuk mengurangi beban pengeluaran keluarga miskin dan rentan tersebut dalam memenuhi kebutuhan pangannya selama masa pandemik (Subroto, 2009).

Pemerintah Desa Sumberejo sampai pada tahap kedua penyaluran bantuan sosial, Pemerintah Desa Sumberejo memberikan bantuan sosial dalam bentuk sembako yang pendistribusiannya akan melalui aparat kelurahan dan kepala lingkungan yang dikoordinasikan langsung oleh RT dan RW. Terlepas dari itu Pemerintah Desa Sumberejo melalui Dinas Sosial juga sedang mempersiapkan data warga yang akan mendapatkan bantuan sembako, berdasarkan wawancara yang dilakukan dalam penentuan masyarakat yang berhak atau tidak berhak untuk mendapatkan bantuan pada Desa Sumberejo dengan cara penyaluran pemberian bantuan dana miskin atau disebut dengan PKH pada Kantor Desa Sumberejo telah dilakukan lewat masing-masing RT dan ditugaskan kepada pendamping PKH yang menentukan berhak dan tidaknya keluarga untuk mendapatkan bantuan dana.(Moonti & Kadir, 2018). Sistem

Pendukung Keputusan adalah sebuah sistem yang dimaksudkan untuk mendukung para pengambil keputusan manajerial dalam situasi keputusan semiterstruktur. DSS dimaksud untuk menjadi alat bantu bagi para pengambil keputusan untuk memperluas kapabilitas mereka, namun tidak untuk menggantikan penilaian mereka. Metode pengambilan keputusan *Analytical Hierarchy Process (AHP)* pertama kali dikembangkan pada tahun 1980, oleh Thomas L. Saaty dalam bukunya *Analytical Hierarchy Process*. *Analytical Hierarchy Process (AHP)* merupakan proses dalam pengambilan keputusan dengan menggunakan perbandingan berpasangan (*pairwise comparisons*) untuk menjelaskan faktor evaluasi dan faktor bobot dalam kondisi multi factor. (Informatika, 2020)

State of The Art



Gambar 1. Usecase Diagram

METODE PENELITIAN

Mengumpulkan suatu data-data yang dilakukan dengan suatu observasi menurut kuesioner (angket), yang telah direkomendasikan dilakukan untuk mendapatkan suatu kriteria-kriteria yang akan dijadikan sebuah penilaian dalam sebuah penelitian sesuai daftar pertanyaan yang disusun untuk mendapatkan sebuah keterangan dari para responden, Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data-data tentang bantuan, yang diolah dengan menggunakan metode pendataan keluarga Metode pengembangan sistem menggunakan sistem

pendukung keputusan untuk pemberian dana bagi masyarakat kurang mampu menggunakan metode penelitian lapangan (*Field Research*) kemudian menginterpretasikan bagaimana subjek memperoleh makna dari lingkungan sekeliling. Dan bagaimana makna tersebut mempengaruhi perilaku mereka. Penelitian ini dilakukan dalam latar (*Setting*) yang alamiah (*Naturalistic*) bukan hasil perlakuan (*Treatment*) atau manipulasi variabel yang dilibatkan.

Berikut ini akan disajikan tabel silang hubungan dari item-item pada variabel kemampuan kerja aparat pelaksana program (X1) dengan item-item pada variabel implementasi program OPKB (Y).

Tabel 1. Hubungan antara Tingkat Kepuasan Masyarakat dengan Tingkat kejelasan Sasaran Program Paket Sembako

Tingkat Kejelasan Sasaran Program Paket Sembako	Tingkat Penguasaan materi Program OPKB				Jumlah
	Sangat Puas	Puas	Kurang Puas	Tidak Puas	
Sangat Jelas	1 (25%)	11 (31,42%)	2 (14,28%)	-	14 (23,33%)
Jelas	3 (75%)	22 (62,86%)	8 (57,14%)	4 (57,14%)	37 (61,67%)
Kurang Jelas	-	2 (5,72%)	4 (28,58%)	1 (14,29%)	7 (11,67%)
Tidak Jelas	-	-	-	2 (28,57%)	2 (3,33%)
Jumlah	4 (100%)	35 (100%)	14 (100%)	7 (100%)	60 (100%)

Sumber : data Primer

Responden yang sangat menguasai materi program OPKB, 1 responden (25%) menyatakan sangat jelas terhadap sasaran Program OPKB, 3 responden (75%) menyatakan jelas. Selanjutnya responden yang menyatakan menguasai materi program OPKB, 11 responden (32,42%) menyatakan sangat jelas terhadap sasaran program OPKB, 22 responden (62,86%) menyatakan jelas. Dari responden yang kurang menguasai materi program OPKB, 2 responden (14,28%) menyatakan sangat jelas terhadap sasaran program OPKB, 8 responden (57,14%) menyatakan jelas dan 4 responden (28,58%) menyatakan kurang jelas. Di lain pihak responden yang menyatakan tidak menguasai materi program OPKB, 4 responden (57,14%) menyatakan jelas terhadap sasaran program OPKB, 1 responden (14,29%) menyatakan kurang jelas dan 2 responden (28,57%) menyatakan tidak jelas. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa penguasaan terhadap materi program OPKB sangat berkaitan erat dengan kejelasan sasaran program OPKB. Pelaksana yang menguasai materi program OPKB pasti jelas terhadap sasaran program OPKB atau sebaliknya pelaksana yang tidak menguasai program OPKB pasti tidak jelas terhadap sasaran program OPKB.

Tabel 2. Hubungan antara Tingkat Membaca Buku Juklak Program dengan Tingkat Kepahaman Tujuan Program OPKB

Tingkat Kepahaman Tujuan Program OPKB	Tingkat Membaca Buku Juklak Program				Jumlah
	Sangat Sering	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	
Sangat Paham	5 (100%)	14 (50%)	2 (15,38%)	-	21 (35%)
Paham	-	11 (39,29%)	3 (23,08%)	2 (14,29%)	16 (26,67%)
Kurang Paham	-	1 (3,56%)	5 (38,46%)	2 (14,29%)	8 (13,33%)
Tidak Paham	-	2 (7,14%)	3 (23,08%)	10 (71,42%)	15 (25%)
Jumlah	5 (100%)	28 (100%)	13 (100%)	10 (100%)	60 (100%)

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no. 10 dan 18

Responden yang sangat sering membaca buku juklak program OPKB, 5 responden (100%) menyatakan sangat paham terhadap tujuan program OPKB. Dari responden yang menyatakan sering membaca buku juklak program OPKB, 14 responden (50%) menyatakan sangat paham terhadap tujuan program OPKB, 11 responden (39,29%) menyatakan paham, 1 responden (3,57%) menyatakan kurang paham dan 2 responden (7,14%) menyatakan tidak paham. Selanjutnya responden yang kadang-kadang membaca buku juklak program OPKB, 2 responden (15,38%) menyatakan sangat paham terhadap tujuan program OPKB, 3 responden (23,08%) menyatakan paham dan 5 responden (38,46%) menyatakan kurang paham dan 3 responden (23,08%) menyatakan tidak paham. Di lain pihak responden yang menyatakan tidak pernah membaca buku juklak program OPKB, 2 responden (14,29%) menyatakan paham terhadap tujuan program OPKB, 2 responden (14,29%) menyatakan kurang paham dan 10 responden (71,42%) menyatakan tidak paham. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat membaca buku juklak program OPKB sangat berkaitan erat dengan tingkat keahaman terhadap tujuan program OPKB. Pelaksana yang sering membaca buku juklak program OPKB pasti paham terhadap tujuan program OPKB atau sebaliknya pelaksana yang tidak pernah membaca buku juklak program OPKB pasti tidak paham terhadap tujuan program OPKB.

Berikut ini akan disajikan tabel silang hubungan dari item-item pada variabel koordinasi (X_2) dengan item-item pada variabel implementasi program OPKB (Y).

Tabel 3. Hubungan antara Tingkat Kesesuaian Perintah Antar Instansi terkait dengan Tingkat Dukungan terhadap Pelaksanaan Program OPKB

Tingkat Dukungan terhadap pelaksanaan Program OPKB	Tingkat Kesesuaian Perintah antar-instansi terkait				Jumlah
	Sangat Bertentangan	Bertentangan	Agak bertentangan	Tidak Bertentangan	
Sangat Mendukung	-	3	1	5	9
	-	(23,08%)	(14,28%)	(12,5%)	(15%)
Mendukung	-	7	3	30	40
	-	(53,84%)	(42,86%)	(75%)	(66,67%)
Kurang Mendukung	-	3	3	5	11
	-	(23,08%)	(42,86%)	(12,5%)	(18,33%)
Tidak Mendukung	-	-	-	-	-
Jumlah	-	13	7	40	60
	-	(100%)	(100%)	(100%)	(100%)

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no. 11 dan 32

Dari sekelompok responden yang menyatakan bahwa perintah antar instansi terkait dengan program OPKB tidak bertentangan satu dengan yang lain, 5 responden (12,5%) menjawab sangat mendukung pelaksanaan program OPKB, 30 responden (75%) menjawab mendukung dan 5 responden (12,5%) menjawab kurang mendukung pelaksanaan program OPKB. Dari responden yang menyatakan bahwa perintah antar instansi terkait dengan program OPKB agak bertentangan satu sama lain 1 responden (14,28%) menyatakan sangat mendukung pelaksanaan program OPKB, 3 responden (42,86%) menyatakan mendukung dan 3 responden (42,86%) menyatakan kurang mendukung. Selanjutnya responden yang menyatakan bahwa perintah antar instansi terkait dengan program OPKB bertentangan, 3 responden (23,08%) menyatakan sangat mendukung terhadap pelaksanaan program OPKB, 7 responden (53,84%) menyatakan mendukung dan 3 responden (23,08%) menyatakan kurang mendukung. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa kesesuaian perintah antar-instansi terkait haruslah seragam, agar dalam pelaksanaan suatu program tidak terjadi perbedaan pandangan/persepsi antar-pelaksana di lapangan. Apabila perintah yang diberikan tersebut bertentangan antara instansi yang satu dengan instansi yang lain maupun antar pelaksana, maka akan memicu konflik antar pelaksana di lapangan maupun dalam masyarakat. Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa perintah yang bertentangan menyebabkan pelaksana tidak/kurang memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program OPKB, begitupun sebaliknya pelaksana akan memberikan dukungan terhadap pelaksanaan program OPKB,

apabila perintah yang dikeluarkan oleh instansi yang terkait dengan program OPKB tidak bertentangan.

Tabel 4. Hubungan antara Tingkat Pandangan/Persepsi dengan Tingkat Dukungan terhadap Pelaksanaan Program OPKB

Tingkat Dukungan terhadap pelaksanaan Program OPKB	Tingkat Pandangan/Persepsi				Jumlah
	Sangat Positif	Positif	Agak Negatif	Negatif	
Sangat Mendukung	-	8	1	-	9
Mendukung	2 (66,67%)	27 (69,23%)	4 (50%)	7 (70%)	40 (66,67%)
Kurang Mendukung	1 (33,33%)	4 (10,26%)	3 (37,5%)	3 (30%)	11 (18,33%)
Tidak Mendukung	-	-	-	-	-
Jumlah	3 (100%)	39 (100%)	8 (100%)	10 (100%)	60 (100%)

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no. 11 dan 33

Responden yang mempunyai pandangan sangat positif terhadap pelaksanaan program OPKB, 2 responden (66,67%) menyatakan mendukung terhadap pelaksanaan program OPKB, 1 responden (33,33%) menyatakan kurang mendukung. Dari responden yang mempunyai pandangan yang positif terhadap pelaksanaan program OPKB, 8 responden (20,51%) menyatakan sangat mendukung terhadap pelaksanaan OPKB, 27 responden (69,23%) menyatakan mendukung dan 4 responden (10,26%) menyatakan kurang mendukung. Selanjutnya responden yang mempunyai pandangan yang agak negatif terhadap pelaksanaan program OPKB, 1 responden (12,5%) menyatakan sangat mendukung terhadap pelaksanaan program OPKB, 4 responden (50%) menyatakan mendukung dan 3 responden (37,5%) menyatakan kurang mendukung. Di lain pihak responden yang mempunyai pandangan yang negatif terhadap pelaksanaan program OPKB, 7 responden (70%) menyatakan mendukung terhadap pelaksanaan program OPKB dan 3 responden (30%) menyatakan kurang mendukung. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pelaksana yang mempunyai pandangan/persepsi yang positif terhadap pelaksanaan program OPKB, maka akan mendukung pelaksanaan program tersebut. Sebaliknya, pelaksana yang mempunyai pandangan yang negatif terhadap pelaksanaan program OPKB, maka tidak akan mendukung adanya program tersebut.

Berikut ini akan disajikan tabel silang hubungan dari item-item pada variabel Tingkat Pengawasan (X_3) dengan item-item pada variabel implementasi program OPKB (Y)

Tabel 5. Hubungan antara Tingkat Pemberian Instruksi dari Pimpinan dengan Frekuensi Pelaporan Pelaksanaan Program OPKB

Frekuensi Pelaporan Pelaksanaan Program OPKB	Tingkat Pemberian instruksi dari pimpinan				Jumlah
	Sangat Sering	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	
7 - 12 kali	-	20 (64,52%)	10 (58,82%)	5 (41,67%)	35 (58,34%)
4 - 6 kali	-	3 (9,68%)	2 (11,76%)	-	5 (8,33%)
1 - 3 kali	-	3 (9,68%)	5 (29,42%)	3 (25%)	11 (18,33%)
Tidak pernah	-	5 (16,12%)	-	4 (33,33%)	9 (15%)
Jumlah	-	31 (100%)	17 (100%)	12 (100%)	60 (100%)

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no. 8 dan 42

Responden yang menyatakan seringnya pimpinan memberikan instruksi, 20 responden (64,52%) menyatakan sangat sering memberikan pelaporan pelaksanaan program OPKB di lapangan yaitu setiap bulan atau 7 - 12 kali dalam setahun, 3 responden (9,68%) menjawab 4 - 6 kali, 3 responden (9,68%) menjawab 1 - 3 kali dan 5 responden (16,12%) menjawab tidak pernah melaporkan pelaksanaan program OPKB kepada pimpinan. Dari responden yang menyatakan menguasai materi Program OPKB, 11 responden (32,42%) menyatakan bahwa pimpinan jarang/kadang-kadang memberikan instruksi, 10 responden (58,82%) menjawab pelaporan pelaksanaan Program OPKB dilakukan 7 - 12 kali setahun, 2 responden (11,76%) menjawab 4 - 6 kali setahun dan 5 responden (29,42%) menjawab 1 - 3 kali . Selanjutnya responden yang menyatakan bahwa pimpinan tidak pernah memberikan instruksi, 5 responden (41,67%) menjawab pelaporan pelaksanaan program OPKB dilakukan sebanyak 7 - 12 kali setahun, 3 responden (25%) menjawab 1 - 3 kali dan 4 responden (23,33%) menyatakan tidak pernah melaporkan pelaksanaan program OPKB di lapangan kepada pimpinan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemberian instruksi yang sering dari pimpinan kepada bawahan (dalam hal ini adalah pelaksana program di lapangan), maka intensitas pelaporan pelaksanaan program di lapangan akan sering dilakukan yaitu setiap bulan sekali atau 7 - 12 kali. Sebaliknya apabila pimpinan tidak pernah memberikan instruksi kepada pelaksana di lapangan, maka pelaporan pelaksanaan program tidak pernah dilaksanakan atau hanya 1 - 3 kali setahun. Frekuensi pelaporan yang sedikit menyebabkan pelaksanaan program berjalan tidak sesuai dengan ketentuan semula.

Tabel 6. Hubungan antara Frekuensi Pemeriksaan yang dilakukan oleh Pimpinan dengan Frekuensi Pelaporan Pelaksanaan Program OPKB

Frekuensi Pelaporan Pelaksanaan Program OPKB	Frekuensi Pemeriksaan yang dilakukan Pimpinan kepada Pelaksana Program di lapangan				Jumlah
	4 kali	2 - 3 kali	1 kali	Tidak pernah	
7 - 12 kali	5 (55,55%)	8 (66,67%)	6 (35,29%)	16 (72,73%)	35 (58,33%)
4 - 6 kali	1 (11,11%)	3 (25%)	4 (23,53%)	2 (9,09%)	10 (16,67%)
1 - 3 kali	3 (33,33%)	-	3 (17,65%)	2 (9,09%)	8 (13,33%)
Tidak Pernah	-	1 (8,33%)	4 (23,53%)	2 (9,09%)	7 (11,67%)
Jumlah	9 (100%)	12 (100%)	17 (100%)	22 (100%)	60 (100%)

Sumber : diolah dari jawaban pertanyaan no. 8 dan 44

Dari sekelompok responden yang menyatakan bahwa pimpinan sangat sering melakukan pemeriksaan kepada pelaksana di lapangan yaitu 4 kali setahun, 5 responden (55,55%) menjawab sangat sering memberikan pelaporan pelaksanaan program kepada pimpinan sebanyak 7 - 12 kali, 1 responden (11,11%) menjawab 4 - 6 kali dan 3 responden (33,33%) menjawab 1 - 3 kali. Dari responden yang menyatakan bahwa pimpinan sering melakukan pemeriksaan pelaksanaan program di lapangan yaitu 2 - 3 kali, 8 responden (66,67%) menyatakan sangat sering memberikan pelaporan pelaksanaan program OPKB di lapangan yaitu setiap bulan atau 7 - 12 kali, 3 responden (25%) menjawab 4 - 6 kali dan 1 responden (8,33%) menjawab tidak pernah melaporkan pelaksanaan program OPKB kepada pimpinan. Selanjutnya responden yang menyatakan bahwa pemeriksaan yang dilakukan pimpinan hanya sekali setahun, 6 responden (35,29%) menjawab bahwa pelaporan pelaksanaan program di lapangan sangat sering dilakukan yaitu 7 - 12 kali, 4 responden (23,53%) menjawab 4 - 6 kali setahun, 3 responden (17,65%) menjawab 1 - 3 kali dan 4 responden (23,53%) menjawab tidak pernah. Di lain pihak responden yang menyatakan bahwa pimpinan tidak pernah melakukan pemeriksaan, 16 responden (72,73%) menjawab pelaporan pelaksanaan program OPKB dilakukan sebanyak 7 - 12 kali setahun, 2 responden (9,09%) menjawab 4 - 6 kali, 2 responden (9,09%) menjawab 1 - 3 kali dan 2 responden (9,09%) menyatakan tidak pernah melaporkan pelaksanaan program OPKB di lapangan kepada pimpinan.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pemeriksaan yang sering dilakukan pimpinan kepada bawahan (dalam hal ini adalah pelaksana program di lapangan) akan memacu semangat pelaksana di lapangan untuk melaksanakan tugasnya secara optimal,

sehingga intensitas pelaporan pelaksanaan program di lapangan akan sering dilakukan yaitu setiap bulan sekali atau 7 - 12 kali. Sebaliknya apabila pimpinan tidak pernah melakukan pemeriksaan kepada pelaksana di lapangan, maka pelaporan pelaksanaan program tidak pernah dilaksanakan atau hanya 1 - 3 kali setahun.

SIMPULAN

Kemampuan kerja aparat pelaksana program dalam implementasi program OPKB sudah cukup tinggi, hanya saja ada beberapa hal yang perlu diusahakan untuk perbaikan di beberapa bagian yaitu :Perlunya pemberian kursus dan pelatihan tentang pelaksanaan program OPKB, agar dapat meningkatkan pengetahuan, ketrampilan dan pemahaman pelaksana terhadap Prorgam OPKB yang akan dilaksanakan, sehingga memudahkan pelaksana dalam penyelesaian masalah yang timbul di lapanga, serta menyiapkan tenaga terlatih dalam jumlah yang cukup yaitu jumlah dan kemampuan pelaksana yang disesuaikan dengan jumlah sasaran penerima program.

DAFTAR PUSTAKA

- ABBAS, A. (2017). Ekonomi Islam Dan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat. *Dialog*, 32(1), 117–131. <https://doi.org/10.47655/dialog.v32i1.132>
- Aziz, N. L. L. (2016). Otonomi Desa dan Efektivitas Dana Desa. *Jurnal Penelitian Politik*, 13(2), 193–211. <https://doi.org/10.14203/JPP.V13I2.575>
- Erawati, T., & Parera, A. M. W. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Dan Pelayanan Fiskus. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 37. <https://doi.org/10.24964/ja.v5i1.255>
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupiis: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1.9974>
- Informatika, I. J. (2020). *INFOTECH: Jurnal Informatika & Teknologi*. 1, 43–55.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. (2017). Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing "Goodwill,"* 8(2), 106–115. <https://doi.org/10.35800/jjs.v8i2.17199>
- Moonti, R. M., & Kadir, Y. (2018). Pencegahan Korupsi Dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan*, 6(3), 430. <https://doi.org/10.29303/ius.v6i3.583>

- Nafiah, Z. ., & Warno, W. . (2018). Pengaruh Sanksi Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Kualitas Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi Dan Bangunan (Study Kasus Pada Kecamatan Candisari Kota Semarang Tahun 2016). *Jurnal Stie Semarang*, 10(1), 86–105. <https://doi.org/10.33747/stiesmg.v10i1.88>
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 1–109.
- Wida, S. A., Supatmoko, D., & Kurrohman, T. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa – Desa Kecamatan Rogojampi Kabupaten Banyuwangi (The Accountability in the Management of the Village Fund Allocation in Villages at Rogojampi District , Banyuwangi Regency). *E-Journal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi*, IV(2), 148–152.